



# Siaran Pers

## BKSAP DPR dan Parlemen Uni Eropa Helat Diskusi Daring Sikapi Kudeta Myanmar

Badan Kerja Sama Antar-  
Parlemen (BKSAP)  
DPR RI

Sekretariat:  
Ged. Nusantara III,  
Lt. 4Jl. Jend. Gatot  
Subroto Jakarta  
10270 Indonesia

Website:  
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:  
[@bksapdprr](https://twitter.com/bksapdprr)

Instagram:  
[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:  
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP_DPR_RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negaralain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut,  
silakan menghubungi Biro  
KSAP:  
021-5715814  
[biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

Jakarta, 12/5/2021- Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR dan Delegasi Parlemen Uni Eropa untuk ASEAN (DASE) mengelat pertemuan secara daring pada Selasa (11/5). Kedua pihak fokus mendiskusikan perkembangan situasi di Myanmar.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Pickett didapuk menyampaikan sambutan pembuka. Diplomat asal Belanda itu menekankan peran yang dapat dilakukan kedua pihak terkait krisis Myanmar yang semakin tidak kondusif. Sementara Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP, ditunjuk untuk memimpin diskusi dan memberikan sejumlah pandangan strategis.

“Insiden kudeta Myanmar dicemaskan berdampak ke kawasan, membahayakan keamanan, stabilitas politik, upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, demokrasi dan hak asasi manusia,” ujar Mardani mengingatkan.

Pada sisi lain, pimpinan BKSAP yang mengurus Kerja Sama Bilateral itu menyampaikan posisi DPR terkait kudeta tersebut yaitu mengutuk kekerasan terhadap pihak pro demokrasi, urgensi perlindungan rakyat Myanmar, dan pemulihan demokrasi.

Lebih lanjut ditambahkan dia bahwa DPR mengapresiasi keputusan konsensus Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN terbaru terkait Myanmar. “Konsensus sangat bagus namun sangat menyedihkan lantaran kekerasan di Myanmar masih berlanjut, bahkan berada di ambang perang saudara. Ini bisa menyulut krisis baru di kawasan. DK PBB harus menyiapkan pilihan terburuk termasuk embargo. Akses bantuan kemanusiaan juga harus dipastikan terlebih di saat pandemi saat sekarang,” tegas dia.

Politisi PKS itu juga menegaskan bahwa DPR telah mendorong *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) agar menyiapkan tindakan yang perlu diambil dalam menyikapi kudeta Myanmar. “DPR sudah meminta forum parlemen ASEAN untuk mempertimbangkan penangguhan sementara keanggotaan Myanmar sampai junta militer mengembalikan parlemen Myanmar yang telah dibubarkan,” kata dia menegaskan.

Sementara Ketua DASE Daniel Caspary menilai positif lima konsensus KTT ASEAN terbaru terkait Myanmar. Politisi Jerman itu menekankan urgensi implementasi konsensus, dialog, restorasi demokrasi dan HAM.

Pertemuan BKSAP-DASE tersebut juga dihadiri Sihar Sitorus (PDIP), Achmad Hafisz Tohir (PAN), dan Heidi Hautala (Wakil Presiden Parlemen Uni Eropa). Pertemuan menghasilkan rancangan Sikap Bersama BKSAP DPR dan DASE Parlemen Uni Eropa terkait krisis Myanmar.